

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong-menolong dan bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena mereka pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan.¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, diantaranya adalah dengan utang kepada pihak Bank, yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian Bank terdapat dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

¹Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hal. 2.

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan pengertian Kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan di dalam pasal 1 butir 11 UU dirumuskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Hal ini sesuai dengan salah satu usaha bank umum yakni memberikan kredit (pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) merupakan salah satu bank umum yang memberikan kredit dalam bentuk sederhana, prosedur mudah dan tidak rumit, serta syarat yang tidak memberatkan dengan jaminan yang ringan.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Boyolali menyediakan beberapa fasilitas antara lain: Tabungan dan pinjaman atau Kredit, disini penulis akan lebih menfokuskan tentang perjanjian kredit. Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Boyolali ada beberapa macam dan beberapa fasilitas kredit dan peruntukkannya dengan syarat dan ketentuan masing-masing, tergantung dengan kredit yang digunakan. Produk perkreditan yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali meliputi: Kredit Komersial, Kredit Konsumer dan Kredit Program. Kredit Komersial terdiri dari Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Kredit Konsumer terdiri dari Kredit Pemilik Rumah (KPR), Kredit Penghasilan, Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).

Jenis Kredit Program adalah Kupedes Rakyat dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE).

Hubungan perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nasabah yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dan nasabah menikmati fasilitas tersebut. Disini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) meminjamkan kredit dan nasabah adalah peminjam kredit.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dalam bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata,

bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank.

Pemberian jaminan oleh debitur merupakan salah satu cara untuk memperkecil risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Tujuan jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu, jaminan yang diserahkan oleh debitur merupakan beban sehingga debitur akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambarnya. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Hal ini dimaksudkan apabila terjadi kemacetan maka jaminan kredit dapat berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan atas tanah, gadai, dan sebagainya.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara

menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

Berdasarkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha serta latar belakang masalah mengenai Perjanjian Kredit tersebut diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BOYOLALI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian Kredit pada Bank BRI?
2. Bagaimana hak dan kewajiban kedua belah pihak setelah terjadinya Kredit pada Bank BRI?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kredit dan perbuatan melawan hukum pada Bank BRI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan proses pelaksanaan perjanjian Kredit pada Bank BRI.
2. Untuk mendiskripsikan hak dan kewajiban setelah terjadinya Kredit pada Bank BRI.
3. Untuk mendiskripsikan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Kredit dan perbuatan melawan hukum pada pada BRI.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis
 - a. Penulisan ini mempunyai manfaat yakni dapat menambah pengetahuan tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit.
 - b. Mempunyai manfaaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam kaitan masalah yang mana telah diteliti.

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan masukan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada masyarakat dalam hal lebih memahami mengenai perjanjian kredit pada bank BRI.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, suatu tambahan informasi, referensi maupun literature bagi ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum Perjanjian Kredit.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untruk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini

²Kudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta; Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

menggunakan suatu metode normatif, yaitu sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif.³ Sehingga dalam penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah/ norma-norma hukum tentang Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendetail atau mendalam. Dalam arti, penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkapkan segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.⁴ Artinya penelitian ini akan membahas dan memaparkan secara mendalam mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data penelitian sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi

³Hadikusuma Hilman 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hal.60,

⁴Toto syatori Nasehudin & Nanang Gozali, . Hal. 57

untuk menjawab masalah yang diteliti.⁵ Data sekunder merupakan referensi yang berupa penelitian kepustakaan, buku-buku dan informasi dari Bank BRI yang dapat menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer, seperti:

- a) Buku hukum perbankan,
- b) Hasil-hasil penelitian,
- c) Hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- d) Internet

⁵Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: GRAHA ILMU. Hal.17

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Seperti :

- a) kamus hukum; dan
- b) bahan pustaka lainnya.⁶

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung dari lapangan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian juga untuk menunjang data sekunder. Data primer terdiri dari :

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tentang perjanjian kerja dan realisasinya ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bank BRI yang beralamat di Jalan Pandanaran 154, Boyolali. Pemilihan lokasi ini karena bank BRI Boyolali merupakan Pemberi Kredit Cabang Boyolali

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek-subjek antara lain :

- a) Kepala Cabang Bank BRI
- b) Supervisor
- c) Account Officer

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 93

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

a. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data sekunder dikumpulkan dengan 2 (dua) metode yakni :

1) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mencari, menghimpun dan mempelajari keempat bahan tersebut diatas.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksud yakni perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali.

b. Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer diperoleh dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yaitu:

⁷Nasution, 2003, *Metodologi Research Penelitian Ilmia* , Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 143

1) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi atau pengamatan langsung merupakan kegiatan langsung data pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁸ data yang dikumpulkan secara langsung dan menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali.

2) Wawancara (*Interview*)

Yang dimaksud dengan wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan /atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Account Officer dan Supervisor.

5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan,

⁸Syofian Siregar, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan PERBANDINGAN PERHITUNGAN MANUAL & SPSS*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP. Hal. 19

jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Boyolali. Yang kemudian akan dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis studi lapangan yang berupa hasil wawancara responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas dari penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut :

Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka menjadi judul bab II yang didalamnya menyantumkan tentang pengertian perjanjian kredit, pengertian Bank BRI, pengertian tanggung jawab hukum, pihak-pihak dalam perjanjian kredit, hubungan antara para pihak dalam perjanjian kredit, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit, peraturan yang dipakai di bank BRI, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar perjanjian atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ganti rugi, berakhirnya perjanjian kredit.

Dalam bab III ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas sejarah berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia, visi dan misi PT. Bank Rakyat Indonesia, struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia, jasa-jasa yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang boyolali, jenis kredit yang diberikan PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Boyolali, proses pelaksanaan perjanjian kredit pada, hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang boyolali, tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan perbuatan melawan hukum.

Bab IV sebagai penutup diisi dengan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.